

ABSTRAKSI

Pelaku usaha menyelenggarakan program undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang dan/atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14A/HUK/2006 Tahun 2006 tentang Izin Undian, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat dan instansi terkait antara lain Notaris. Dewasa ini, telah berkembang fenomena rekayasa program undian oleh para pelaku usaha dengan terlebih dahulu mengatur para pemenangnya, sehingga terselenggara pengundian yang tidak murni dan obyektif. Selain itu, pelaku usaha mencantumkan klausula “ keputusan juri/penyelenggara undian tidak dapat diganggu gugat “. Hal ini termasuk indikasi rangkaian penyimpangan yang merugikan masyarakat dan konsumen pada khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peran notaris cukup penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu penyelenggaraan program undian berhadiah dan membuat akta berita acara pengundian untuk jenis undian tidak langsung. Notaris merupakan jabatan kepercayaan sehingga wajib menjalankan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, sebab produk yang dihasilkan adalah berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Diharapkan pula bahwa notaris mampu menegakkan independensi jabatannya dengan tidak memihak salah satu pihak dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Kode Etik Notaris.

ABSTRACT

Conducting business hold a lottery program to attract consumers related to its sale of goods and / or services. Based on Act Number 22 Year 1954 regarding Lottery JO. Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 2006 of 14A/HUK/2006 regarding Licensed Lottery, businessman must make application to the Minister of Social Affairs and involving several officials and related agencies such as Notary. Today, engineering has evolved phenomenon lottery program by the principals of business by first set of winners, which held the draw that is not pure and objective. In addition, businessman state clauses business "decision of the jury / organizer sweepstakes inviolability". This includes a circuit indication circuit distortion detrimental to society and consumers in particular as stipulated in Act No. 8 Year 1999 regarding Consumer Protection.

Notary role is important considering legal authority to declare whether the implementation of the lottery program is valid or not and make the deed to the minutes of the draw of the indirectly lottery. Notary is a position of trust that must run its authority with full responsibility, because they issue authentic certificate which has power for perfect proof. Expected that the notary could also uphold the independence of his position with one of the impartial party to provide legal services. This is in accordance with the provisions of Law No 30 Year 2004 regarding Notary Position Jo Notary Code